

LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA NEGARA

tahun : 2020

PENILAIAN	Bobot	Jawaban	Nilai	%	Keterangan	Catatan Evaluator
A. PROSES (60)	60,0		58,62	97,70%		
I. MANAJEMEN PERUBAHAN	5,0		4,78	95,60%		
1 Tim Kerja (1)	1,0		1,00	100,00%		
Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk a. melakukan pembangunan Zona Integritas ?		YA	1		1.a. Daftar Riwayat Hidup 14 (empat belas) orang 1.b. Undangan, Daftar Hadir, Notolen, Photo Kegiatan Pembentukan Tim ZI, SK Nomor W15-A11/521/HK.05/4/2020, tanggal 14 April 2020 tentang Pembentukan Tim Pembangunan ZI PA Negara	
Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan b. dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas ?		A	1		1.b. Mekanisme Penentuan Tim Kerja, Pedoman dan Kriteria Tim Kerja ZI, Undangan, Daftar Hadir, Notolen, Photo Kegiatan Pembentukan Tim ZI, SK Nomor W15-A11/521/HK.05/4/2020, tanggal 14 April 2020 tentang Pembentukan Tim Pembangunan ZI PA Negara	
Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas 2 (1)	1,0		1,00	100,00%		
Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju a. WBK/WBBM ?		YA	1		1.2.a. Undangan Penyusunan Rencana Aksi/Rencana Kerja, Daftar Hadir, Photo Kegiatan, Dokumen Rencana Aksi/Rencana Kerja, Undangan Sosialisasi Dokumen Aksi/Rencana Kerja, Daftar Hadir, Notulen, Photo Kegiatan	

Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan					1.2.b. Dokumen Rencana Kerja, jadwal, Kertas Kerja, Kegiatan Tim ZI, SK Nomor W15-A11/077/Kp. 04.5/l/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Rencana Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM PA Negara
b. tujuan pembangunan WBK/WBBM?	A	1			
Apakah terdapat mekanisme atau media untuk					1.2.c.Mekanisme Sosialisasi Pembangunan ZI, dokumentasi berupa Foto Kegiatan, Banne dan Laporan Sosialisasi Pembangunan ZI, Undangan Sosialisasi Dokumen Aksi/Rencana Kerja, Daftar Hadir, Notulen, Foto Kegiatan
c. mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ?	YA	1			
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan					
3 WBK/WBBM (2)	2,0	1,78	89,00%		
Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah					1.3.a.1.Laporan Kerja Evaluasi ZI dan Komparasi atau Perbandingan Rencana Kerja dan Realisasi Pembangunan ZI,
a. dilaksanakan sesuai dengan rencana ?	B	0,67			3.a.2.Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Foto Kegiatan, Lap Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI bulan Januari sd Juli 2020
Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap					
b. pembangunan Zona Integritas	A	1			
Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah					3.a.3.Laporan Tindak Lanjut Monitoring ZI Menuju WBK WBBM bulan Januari sd Juli 2020
c. ditindaklanjuti ?	A	1			
4 Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (1)					
1,0	1,00	100,00%			
Apakah pimpinan berperan sebagai role model					1.4.a. Undangan Rapat Penertapan Role Model, SK Nomor: W15-A11/504/HK06.4/2020, tanggal 02 April 2020, tentang Role Model Pimpinan dalam pengembangan perilaku dan budaya kerja, Photo Role Model (4 Pilar), Absensi Pimpinan, Photo
a. dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ?	YA	1			

b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?	YA	1	1.4.b. Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Foto Kegiatan, SK Nomor W15-A11/015/Hk.00/1/2020 tentang Penetapan Agen Perubahan PA Negara tahun 2020, BA Hasil Pelaksanaan Pemilihan Agen Perubahan, Riwayat Hidup dan Rekam Jejak, Foto Agen Perubahan terbaru, SK Nomor W15-A11/077/Kp. 03.01/2020 tentang Penentuan Kriteria Agen Perubahan PA Negara thn 2020, SK Nomor W15-A11/077a/Kp. 02.01/2020 tentang Penetapan Program Kerja Agent Of Change PA Negara thn 2020
c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju	YA	1	4.c.Perjanjian Kerja sama dengan PT. Pos Indonesia dan BRI, foto Kegiatan, SK Nomor W15-A11/029/HM.02.3/1/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola TI PA Negara, daftar hadir, Notulen, Foto kegiatan Tim IT, Banner dan Penghargaan yang diraih PA Negara dari Instansi Internal maupun Eksternal, Daftar hadir Pegawai dari Aplikasi Komdanas
d. WBK/WBBM?	A	1	1.4.d. Pakata Integritas, Notuln, Foto-foto Kegiatan, Laporan Pelaksanaan ZI
II. PENATAAN TATALAKSANA	5,0	4,42	88,40%
Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama			
1 (1,5)	1,5	1,50	100,00%
a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi	A	1	2.1.a. Peta Proses Bisnis Instansi berupa : Foto Banner Alur Bisnis Proses Pengadilan Agama Negara, Foto Banner Alur Bisnis Proses Administrasi Manajemen dan Foto Banner Alur Bisnis Proses Administrasi Kepaniteraan serta Foto Banner Alur Bisnis Proses Kesekretariatan

Prosedur operasional tetap (SOP) telah b. diterapkan	A	1	2.1.b. SK KPA Negara No.W15- A11/25a/OT.01/2/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusunan SOP PA.Negara tahun 2020; - SOP Kepaniteraan yang terdiri dari sekitar 60 buah SOP - SOP Keseekretariatan yang terdiri dari sekitar 30 buah SOP - SOP yang diinovasi seperti SOP Penerimaan Perkara, dan lain-lain
Prosedur operasional tetap (SOP) telah c. dievaluasi	A	1	2.1.c. SK KPA Negara No.W15- A11/190a/OT.00/1/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Reviu SOP PA Negara dan SK KPA Negara No.W15- A11/324a/OT.00/2/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Reviu SOP PA Negara; - Laporan Evaluasi SOP terdiri dari Prosedur monitoring dan evaluasi SOP, monitoring dan evaluasi SOP - Evaluasi SOP Kepaniteraan yang terdiri dari 21 SOP; - Evaluasi SOP Keseekretariatan nihil
2 E-Office (2)	2,0	1,42	70,75%

Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah
a. menggunakan teknologi informasi? **A** 1

Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah
b. menggunakan teknologi informasi? **B** 0,5

2.2.a. Pada sistem pengukuran kinerja di Pengadilan Agama Negara sudah menggunakan berbagai macam aplikasi yang terdiri dari : Capture/screenshot atau tangkapan layar Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penerimaan Perkara), Aplikasi SIKEP (Sistem Informasi kepegawaian), Aplikasi Back Up Sikep (ABS), Aplikasi Pendukung Keuangan Perkara, Aplikasi RKAKL, Aplikasi SAIBA, Aplikasi Silabi Penerimaan, Aplikasi Gaji Pegawai Pusat (GPP), Aplikasi SIMAK BMN, Aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset negara), Aplikasi Akuntansi Persediaan, Aplikasi Komdanas (Komunikasi data Nasional), Aplikasi SIMARI, Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan), Aplikasi e-Court, Aplikasi e-Remun (Elektronik Register Tamu dan Informasi) PA.Negara serta SK KPA Negara No.W15-A11/029/HM.02.3/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Tim Pengelola Teknologi Informasi PA Negara tahun 2020;

2.2.b. Pada bidang operasionalisasi manajemen SDM pada Pengadilan Agama Negara sudah menggunakan teknologi informasi, dimana Aplikasi yang dipakai merupakan aplikasi dari pusat dalam hal ini dikelola oleh Mahkamah Agung RI yaitu berupa screenshot atau tangkapan layar aplikasi SIPP (Sistem Informasi manajemen Perkara) dan Aplikasi SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) MARI;

Apakah pemberian pelayanan kepada publik
c. sudah menggunakan teknologi informasi?

A 1

2.2.c. Pemberian layanan kepada publik di Pengadilan Agama Negara sudah menggunakan teknologi informasi hal ini dapat dilihat pada scrennshoot/tangkapan layar berupa website atau laman situs resmi PA Agama Negara dengan alamat : www.pa-negarakasel.go.id, capture Aplikasi SIPP, capture Aplikasi SIWAS dan capture Direktori Putusan terhadap perkara yang telah diputus oleh majelis hakim;

Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan
d. kepada publik?

C 0,33

2.2.d. Pada item ini Pengadilan Agama Negara telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada publik, yang ini disini telah dilampirkan eviden monevnya perbulan dari bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei 2020 yang dilengkapi dengan undangan rapat monev, daftar hadir rapat, notulen rapat dan foto kegiatannya;

3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5)

1,5

1,50 100,00%

<p>a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan</p>	<p>YA</p>	<p>1</p>	<p>2.3.a. Pada bidang kebijakan tentang keterbukaan informasi publik, maka Pengadilan Agama Negara telah menerapkannya, dimana evidennya berupa Surat Keputusan Ketua PA Negara No.W15-A11/112/HM.00/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Jenis-jenis Informasi di Pengadilan Agama Negara, SK No.W15-A11/113/HM.00/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Standar Layanan informasi di Pengadilan Agama Negara, SK No.W15-A11/130/OT.00.1/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukkan Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Negara. Dan selain itu eviden pada bidang ini telah dilengkapi dengan capture atau tangkapan layar keterbukaan informasi publik berupa capture/tangkapan layar website atau laman resmi Pengadilan Agama Negara (www.pa-negarakalsel.go.id), capture SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang bisa diakses publik melalui website, capture SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan), capture laman resmi di Youtube dan Instagram tentang segala kegiatan yang berlangsung di Pengadilan Agama Negara;</p>
<p>b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik</p>	<p>YA</p>	<p>1</p>	<p>2.3.b. Eviden Monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik pada PA. Negara ini terdiri dari Monev bulan Januari, Februari dan Maret 2020 yang dilengkapi dengan undangan rapat monev, daftar hadir, notulen rapat dan foto kegiatan perbulan;</p>

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		15,0	15,00	100,00%
Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan				
1 Kebutuhan Organisasi (2)		2,0	2,00	100,00%
a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing a. jabatan?		YA	1	3.1.a. Peta Jabatan, Undangan, daftar Hadir, Notolen Perencanaan Kebutuhan Pegawai, ABK 2020 dan Rekapitulasi ABK 2020, Anjab 2020 dan Hasil Perhitungan Formasi Jabatan 2019
b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang b. telah disusun per jabatan?		A	1	3.1.B. Pembinaan Dan Pembekalan CPNS berupa: SK Penempatan (surat Tugas Nomor : 1496?sek/Kp.00.3/ST/2/2018) tanggal 13 february 2018, SK CPNS Nomor: 1496/SEK/CPNS.04.1/SK/XI/2017, tanggal 30 Nopember 2017, SK Penempatan Hakim Nomor : 980/DJA/KP.04.6/SK/3/2020, tanggal 17 Maret 2020 , SK Pengangkatan Honorer/Tenaga Kontrak Nomor : W15-A11/046/KP.00.2/1/2020, tanggal 02 Januari 2020. SPMT Tenaga Kontrak Nomor :W15-A11/046.a/KP.00.2/1/2020, Uraian Tugas /JOB Tenaga Kontrak.
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan c. terhadap kinerja unit kerja?		YA	1	3.1.c. Monev SDM berupa: Undangan, Daftar hadir, Notulen, Monev SDM dan Hasil Monev dari Januari Sampai Mei 2020 beserta foto kegiatan, Monev Jabatan Kepaniteraan 2020, Evaluasi jabatan Kepaniteraan dan foto Kegiatan .
2 Pola Mutasi Internal (2)		2,0	2,00	100,00%

<p>a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?</p>	<p>YA</p>	<p>1</p>	<p>3.2.A. SK Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Agama Negara Nomor : W15-A11/040/KP.07.1/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 , Undangan, Daftar Hadir Notulen dan hasil Beperjakat 2019, SK Mutasi, Ijazah, sertifikat Pelatihan Anggaran, Sertifikat Bendahara, Undangan pelantikan 2019, naskah pelantikan dan foto kegiatan pelantikan 2019, Undangan Daftar Hadir Notulen TPM 2020, foto kegiatan, Riwayat Mutasi, Kegiatan Monev Mutasi Internal berupa Undangan daftar Hadir Notulen dan Hasil Monev 2020 dari bulan Januari sampai dengan Mei 2020, Pelantikan 2020 berupa Undangan,Naskah Pelantikan dan foto kegiatan</p>
<p>b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?</p>	<p>A</p>	<p>1</p>	<p>3.2.B. SK Tim Monev Mutasi Nomor : w15-A11/497/Kp.04.6/4/2020, tanggal 02 April 2020, Undangan daftar Hadir Notulen Pembentukan Tim Mutasi Internal April 2020 dan foto kegiatan, SK Pola Mutasi Internal Nomor : W15-A11/084/Kp.04.6/01/2020, tanggal 02 januari 2020, Pola Mutasi Internal Jabatan Hakim, Kesekretariatan Kepaniteraan, Jusurita dan Jusurita Pengganti, Daftar Riwayat Mutasi.</p>

<p>c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?</p>	YA	1	<p>3.2.C. SK Tim Monev Mutasi Internal Nomor W15-A11/083/Kp.04.6/01/2020 : , Undangan Penyampaian Hasil, Daftar hadir dan Notulen Rapat Monev Mutasi Internal januari 2020, Monitoring Jabatan Kepaniteraan, Evaluasi Jabatan Panmud, PP, Monev Mutasi internal berupa Undangan daftar Hadir dan Notulen dari Januari s/d April 2020 dan foto kegiatan, SK Monev Nomor :W15-A11/497/Kp.04.6/4/2020 tanggal 02 April 2020, Undangan Penyampaian Hasil Monev daftar Hadir Notulen Monev bulan Juli 2020 dan foto kegiatan</p>
3 Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi (3)	3,0	3,00	100,00%
<p>a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ?</p>	YA	1	<p>3.3.A. Analisa Kebutuhan Diklat : Rapat analisa kebutuhan Diklat berupa undangan, Daftar Hadir, Notulen tahun 2020, dan Analisa kebutuhan diklat tahun 2020 serta foto kegiatan</p>
<p>b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?</p>	A	1	<p>3.3.B. Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai : Rapat Rencana pengembangan pegawai berupa undangan, daftar hadir, notulen. analisa kebutuhan diklat pengembangan kompetensi pegawai. penempatan pegawai rekrutmen CPNS, dan rencana kompetensi pengembangan pegawai</p>

<p>c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan</p>	A	1	<p>3.3.C.. Dokumen Standar Promosi Menduduki Jabatan Berupa SK Pola Mutasi Internal Nomor : W15/A11/084/Kp.04.6/01/2020, tanggal 02 Januari 2020, pola mutasi internal jabatan Hakim, kesekretariatan, kepaniteraaan, Panitera Pengganti, Jurusita /Jurusita Pengganti dan SK Tim Monev Mutasi Internal Nomor : W15-A11/497/Kp.04.6/4/2020 tanggal 02 April 2020.</p>
<p>d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.</p>	A	1	<p>3.3.D. usulan diklat : Surat ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin ttng peningkatan kompetensi pegawai, surat usul sertifikat bendahara pengeluaran, blangko pengisian data calon peserta, surat usul sertifikat bendahara penerimaan, surat tugas</p>
<p>e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?</p>	A	1	<p>3.3.E. Dokumen Mengikuti Diklat : surat tugas diklat PIM IV/PKP dan surat pemanggilan, surat tugas diklat saki dan surat pemanggilan, surat tugas diklat sertifikasi hakim mediator dan surat pemanggilan . Sosialisasi hasil diklat saki berupa undangan daftar hadir dan notulen dan Foto kegiatan, Sosialisasi hasil diklat sertifikasi hakim mediator berupa undangan daftar hadir dan notulen dan foto kegiatan, Sosialisasi hasil diklat PIM IV berupa undangan daftar hadir dan notulen dan foto kegiatan</p>

f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?	A	1	3.3.F. Monev Diklat : Undangan, daftar hadir, Notulen, foto kegiatan monitoring dan evaluasi Sakip, Undangan, daftar hadir, Notulen, foto kegiatan monitoring dan evaluasi Sertifikasi Hakim Mediator, Undangan, daftar hadir, Notulen, foto kegiatan monitoring dan evaluasi Aplikasi Surat Izin Keluar
4 Penetapan Kinerja Individu (4)	4,0	4,00	100,00%
a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	A	1	3. 4.a.1.SKP 2019, SKP 2020 dan Perjanjian Kinerja Individu 2019, Perjanjian Kinerja 2020
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	A	1	4.1.b. SKP 2020 dan Struktur Organisasi Pengadilan agama Negara
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	A	1	3.4.C. SKP Harian 2019 dan SKP Harian 2020 3.4.D. Reward Kepada Pegawai : Rapat pemberian reward kepada pegawai berupa undangan, daftar hadir, Notulen, Sk Ketua Reward dan foto kegiatan rapat dan foto pemberian reward
d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).	A	1	
5 Pegawai (3)	3,0	3,00	100,00%

	a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	A	1	3.5.A Sk penetapan pedoman pola pikir, budaya kerja, etika dan aturan perilaku pegawai Pengadilan Agama Nomor. W15-A11/092/OT.01.3/1/2020 tanggal 02 januari 2020, 12 Budaya Malu, surat edaran Penentuan Jam Kerja Dan Pakaian Dinas, blangko surat izin Keluar kantor, blangko surat izin tidak masuk kerja, Rekapitulasi kehadiran pegawai, statistik kepegawaian, rekap absen pagi senin dan jumat sore, surat pengantar laporan absen kehadiran, statistik dan rekapitulasi apel pagi dan sore, surat Sekma tentang Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI, Peraturan MA RI Nomor : 7tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung Mahkamah agung dan badan peradilan dibawahnya, keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. 071/KMA/SK/2008 tentang ketentuan Penegakan Disiplin Kerja gi Pemotongan Tunjangan Kinerja, Himpunan Peraturan Perundangan-Undangan
6 Sistem Informasi Kepegawaian (1)		1,0	1,00	100,00%
	a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.	A	1	3.6.A. Data Sikep, ; berupa laporan hasil pemutakhiran data dan Dokumen pegawai dari bulan Januari 2020 s/d Mei 20202, Update data sikep setiap pegawai Pengadilan Agama Negara, screenShoot Aplikasi SIKEP ABS, screenShoot Aplikasi E-Doc SIKEP, screenshot Aplikasi SIKEP MARI, screenShoot kelengkapan Aplikasi SIKEP 100 Persen.
IV	PENGUATAN AKUNTABILITAS	10,0	10,00	100,00%

1 Keterlibatan Pimpinan (5)		5,0	5,00	100,00%
a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	YA	1	4.1.A. Program Kerja Pengadilan Agama Negara Tahun 2020, Undangan Rapat Koordinasi Program Kerja Tahun 2020, Daftar Hadir Rapat Koordinasi Program Kerja Tahun 2020, Notulen Rapat Koordinasi Program Kerja Tahun 2020, Foto Dokumentasi Rapat Koordinasi Program Kerja Tahun 2020	
b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	YA	1	4.1.B. Penetapan Kinerja Plt Sekretaris 2019, Penetapan Kinerja Sekretaris 2019, Penetapan Kinerja Sekretaris Pengadilan Agama Negara 2020, Penetapan Kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Tahun 2019, Penetapan Kinerja Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2019, Penetapan Kinerja Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Negara Tahun 2019, Penetapan Kinerja Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Negara Tahun 2019, Penetapan Kinerja Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Negara Tahun 2019, Penetapan Kinerja Jurusita Pengadilan Agama Negara Tahun 2019, Undangan Rapat Penyusunan Kinerja Pengadilan Agama Negara Tahun 2020, Daftar Hadir, Notulen Rapat Penyusunan Kinerja Pengadilan Agama Negara Tahun 2020 Dan Foto kegiatan	

				4.1.C Monitoring IKU Kepaniteraan Pelaksanaan Mediasi bulan Januari, Februari, Maret, April. Monitoring IKU Kepaniteraan Penyelesaian perkara bulan januari, february, maret, april. Monitoring IKU Kesekretariatan Proses Penyerapan Anggaran bulan Januari sd Juli 2020, Monitoring IKU Kepaniteraan Keberhasilan Mediasi bulan Januari sd Juli 2020
	c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	YA	1	
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) 5,0 5,00 100,00%				
	a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada	A	1	4.2.A. RKAKL PA NEGARA 2019, RKAKL PA NEGARA 2020, RKT PA NEGARA 2019, PKT PA NEGARA, Renstra 2020-2024, RKT 2018
	b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	A	1	4.2.B. RKAKL PA NEGARA 2018, RKT PA NEGARA 2019, PKT PA NEGARA 2018, PKT PA NEGARA, Review Renstra RKT 2019
	c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)	A	1	4.2.C. IKU PA NEGARA 2019, IKU PA NEGARA 2018, IKU Tambahan PA NEGARA 2020
	d. Apakah indikator kinerja telah SMART (Specifik, Measureable, Achievable, Relevant and d. Time)	A	1	4.2.D. IKU PA NEGARA 2019, IKU PA NEGARA 2018
	e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu	YA	1	4.2.E. LKJIP PA NEGARA 2019, Screenshot Bukti Kirim LKJIP 2019, Screenshot Bukti Upload LKJIP 2019
	f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	A	1	4.2.F. LKJIP PA NEGARA 2019 . Screenchot Hasil Evaluasi LKJIP PTA, Screenshot Hasil Evaluasi LKJIP PA Negara 2019

g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	A	1	2.g. Surat Tugas Pelatihan dan Sertifikat Kompetensi Bendahara a.n MOH. RAMLI, SHI., Surat Tugas Pelatihan dan Sertifikat Kompetensi Bendahara a.n AHMAD RAMLI, SH., Undangan Sosialisasi Penyusunan dan Pelaporan LKJIP tgl 02/12/2019, absensi dan notulen Sosialisasi Penyusunan dan Pelaporan LKJIP tgl 03/12/2019, dokumentasi Sosialisasi dan bimbingan penyusunan pelaporan LKJIP tgl 03/12/2019
h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	A	1	4.2.h. SK Nomor W.15-A11/028/OT.01.2/2020 tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Sertifikat pendidikan dan pelatihan SAKIP a.n Husnan Taparrod, S.H bulan Februari Tahun 2020
V. PENGUATAN PENGAWASAN	15,0	15,00 100,00%	
1 Pengendalian Gratifikasi (3)	3,0	3,00 100,00%	
a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi	A	1	5.1.a.Banner, Edaran Stiker, Surat Intruksi Public Campaign, Stiker ZI, Pembagian Stiker pada Mobil Dinas, Publikasi ZI pada Media Sosial, Video Pecanangan ZI di Website PA Negara, Surat edaran larangan menerima Parsel Kepada Pimpinan, Hakim, Pejabat, Pegawai dan Pegawai Non PNS PA Negara
b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	A	1	5.1.b.Undangan Kapat Notulen Datar Hadir Monev Pengendalian Gratifikasi, Laporan Monev Pengendalian Gratifikasi dari Bulan Januari 2020 S/D Bulan Juli 2020, Bukti Tanda Terima dan Pengumuman LHKPN dan LHKS, Daftar Wajib LHKPN dan LHKS.

2 Penerapan SPIP (3)		3,0	3,00	100,00%
a.	a. Telah dibangun lingkungan pengendalian	A	1	5.2.a.Banner, Edaran Stiker, Surat Intruksi KPA Negara tentang Edaran Stiker, Stiker ZI menuju WBK dan WBBM, Stiker WBS, Pembagian Stiker Pada Mobil Dinas, Publikasi ZI pada Media Sosial, Video Pecanangan ZI di Website PA Negara, Aplikasi SIWAS di Website PA Negara, Surat edaran larangan menerima Parsel Kepada Pimpinan, Hakim, Pejabat, Pegawai dan Pegawai Non PNS PA Negara, Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan PA Negara dari Bulan Januari 2020 S/D Bulan April 2020 Foto kegiatan, Dokumentasi Apel Kedisiplinan: (Apel Senin Pagi, Apel Hari Besar Pahlawan, Apel Jum'at Sore.
b.	b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	A	1	5.2.b.Risk Register, Monitoring Risiko: (Administrasi Kesekretariatan, Manajemen, Kepaniteraan), Prosedur Mutu Manajemen Risiko PA Negara.
c.	c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	A	1	5.2.c.Laporan Identifikasi dan Analisis Risiko PA Negara Tahun 2019, CPAR Pengendalian risiko, Inovasi Pengendalian Risiko (Aplikasi Control Persuratan Intern PA Negara).
d.	d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	A	1	5.2.d. Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulen, Foto Kegiatan, Apel Kedisiplinan.
3 Pengaduan Masyarakat (3)		3,0	3,00	100,00%

a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah a. diimplementasikan	A	1	5.3.a.SK Pembentukan Tim Pengelola Petugas Meja Informasi dan Pengaduan, Tim Pengelola, Screen shoot Aplikasi SIWAS di Website PA Negara, Foto Petugas Meja Pengaduan, Banner Layanan Pengaduan, Kotak Saran, Kotak Pengaduan, Screenshot Aplikasi e- Laporan.
b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat b. telah ditindaklanjuti	A	1	5.3.b.Laporan Pengaduan Masyarakat Mei 2019, Formulir Pengaduan Masyarakat, Laporan Pengaduan Masyarakat Juni 2019, Formulir Tindak lanjut pemeriksaan terlapor, instrumen Berita Acara hasil Pemeriksaan, Instrumen LHP Buku I Agenda Pengaduan PA Negara Januari 2020, laporan Pengaduan Masyarakat Januari 2020 S/D April 2020, Register Pengaduan PA Negara Bulan Januari S/D April 2020.
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas c. penanganan pengaduan masyarakat	A	1	5.3.c.Laporan Bulanan Pengaduan Pa Negara bulan Januari 2019 s/d Desember 2019, Laporan Bulanan Pengaduan Pa Negara bulan Januari 2020 s/d April 2020.
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan d. masyarakat telah ditindaklanjuti	A	1	5.3.d.Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pengaduan dan Whisteblowing Bulan Januari 2019 S/D Desember 2019, Undangan Rapat Daftar Hadir Notulen Monev Pengaduan Masyarakat Januari 2020 s/d April 2020, Laporan Pengawasan Bulan Januari 2020 s/d April 2020.
4 Whistle-Blowing System (3)	3,0	3,00	100,00%

a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?	YA	1	5.4.a.Undangan Daftar Hadir Notulen Monev Pengaduan, WBS, Benturan Kepentingan Bulan Juni 2019 dan Foto Kegiatan, Undangan Daftar Hadir Notulen Sosialisasi Aplikasi SIWAS MA RI Versi 3.0 dan Foto Kegiatan, Screen shoot Aplikasi SIWAS MA RI Online.
b. Whistle Blowing System telah diterapkan	A	1	5.4.b.Banner WBS PA Negara, Screenshot Aplikasi SIWAS (E-Lapor) dan Screenshot Aplikasi SIWAS di Website PA Negara.
c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	A	1	5.4.c. Screenshot Statistik Pengaduan PA Negara, Screenshot Alur Pengaduan PA Negara di Website PA Negara, Screenshot Laporan Pengaduan, Screenshot Instrumen Register Pelapor, Screenshot Aplikasi SIWAS di Website PA Negara, Undangan Rapat Daftar Hadir Notulen Rapat WBS dan foto kegiatan bulan Januari s/d April 2020.
d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	A	1	5.4.d.Laporan Tindak lanjut Hasil Evaluasi Pengaduan WBS Bulan Januari 2019 s/d Desember 2019, Laporan Tindak lanjut Hasil Evaluasi Pengaduan WBS Bulan Januari 2020 s/d Juli 2020.
5 Penanganan Benturan Kepentingan (3)	3,0	3,00	100,00%
a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	YA	1	5.5.a.Identifikasi BK
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	A	1	5.5.b.Undangan Daftar Hadir Notulen Foto Kegiatan Sosialisasi BK Bulan Januari 2020, SK Pedoman Penanganan Benturan kepentingan PA Negara

	c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	A	1	5.5.c.Pedoman Penganan BK tahun 2020 , SK Pembentukan Tim Penanganan BK tahun 2020, Surat Pernyataan KPA Negara Terbebas dari BK Bulan April 2019, Undangan Daftar Hadir Notulen Bulan Juni 2019, Surat pernyataan Tidak Memiliki Potensi BK Ahmad Ramli, S.H., dan Surat pernyataan Tidak Memiliki Potensi BK H. Abdul Khaliq, S.Ag.	
	d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	A	1	5.5.d. Laporan Evaluasi Penanganan BK, Undangan Daftar Hadir Notulen Januari 2020 S/D April 2020,Undangan Daftar hadir Notulen laporan Tindak Lanjut Hasil Monev Benturan Kepentingan Juni 2019, Laporan Pengaduan PA Negara dari Bulan Januari S/D Desember 2019	
	e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	A	1	5.5.e.Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi penanganan BK, Undangan Daftar Hadir Notulen dari Januari S/D Juli 2020	
	6 Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai	0	0,00	%	
	a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	B			10 orang wajib LHKPN dan 10 orang yang sudah melaporkan (8 orang status sudah pengumuman, 2 orang status Verifikasi Lengkap) 10
	b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	B			5 orang yang wajib LHKASN dan 5 orang sudah melaporkan LHKASN 7
VI	. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10,0	9,42	94,20%	
	1 Standar Pelayanan (3)	3,0	2,62	87,50%	

a. a. Terdapat kebijakan standar pelayanan

A

1

6.1.a. SK Nomor W15-A11/12.a/Hk.05/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Negara, Standar Layanan Permohonan Informasi, Standar Pelayanan Biaya Perkara, Standar Pelayanan Penerimaan perkara, Pencatatan dan registrasi perkara masuk, standar Pelayanan Prodeo Murni, Standar Pelayanan Pengaduan, Standar Pelayanan Pengembalian Sisa Panjar, Standar Layanan Biaya Proses, Standar Layanan, Eksekusi lelang, Standar Layanan Eksekusi riil, Standar Pelayanan Pengarsipan Perkara, Standar Pelayanan Mediasi, Standar Minutasi dan Pemberkasan Perkara, Standar Pelayanan Legalisasi, Standar Pelayanan Pengambilan Salinan Penetapan/Putusan atau Akta Cerai oleh pihak yang berperkara, Standar Pelayanan Penyampaian Putusan, Standar Pelayanan Publikasi Putusan, Standar Pelayanan Pemanggilan Para Pihak, Standar Penyelesaian Putusan dan Pemberitahuan isi putusan, Standar Penyitaan, Standar Pelayanan Upaya Hukum BAnding, Standar Pelayanan Upaya Hukum Kasasi, Standar Pelayanan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

b. b. Standar pelayanan telah dimaklumkan	A	1	6.1.b.Foto banner Maklumat Pelayanan, Foto Banner Kompensasi Pelayanan, foto banner Prosedur Pengaduan, Foto Banner Prosedur Pengaduan, Foto Banner Alur Layanan Informasi untuk prosedur biasa, Foto banner Alur Informasin untuk Prosedur biasa, Foto banner bisnis proses kesekretariatan, Foto banner Bisnis Proses Administrasi Kepaniteraan, Foto Banner Bisnis Administrasi Manajemen, Foto Banner Bisnin Proses Pengadilan Agama Negara
c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	A	1	6.1.c.SOP Layanan Informasi Berbasis IT, SOP Penerimaan Perkara, SOP Prosedur Pembayaran Panjar Biaya Perkara, SOP Layanan Permintaan Produk Pengadilan, SOP Layanan Banding, SOP Pelayanan Kasasi, SOP Pelayanan Peninjauan Kembali, SOP Pelayanan Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana, Foto Banner Alur Pelayanan Informasi Untuk Prosedur Biasa, Foto banner bisnis proses kesekretariatan, Foto banner Bisnis Proses Administrasi Kepaniteraan, Foto Banner Bisnis Administrasi Manajemen, Foto Banner Bisnin Proses Pengadilan Agama Negara, Formulir-formulir Permohonan Informasi, foto banner Informasi Pengaduan, screnshoot Inovasi Pelayanan dalam masa pandemi covid-19, SK Tentang Inovasi Pelayanan melalui Mobil Keliling (Mobile Court), Foto Pelayanan Mobil Keliling, Absen Rapat Monev Pelayanan Keliling, Notulen, Foto Rapat, Buku Daftar Pengunjung

6.1.d.SK Nomor W15-A11/324.a/OT.00/2/2020
Tanggal 7 Februari 2020 Tentang Pembentukan
Tim Reviu SOP Pengadilan Agama Negara,
Prosedur Monitoring dan Evaluasi Standar
Operasional Prosedur Pengadilan Agama Negara,
Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional
Operasional, Undangan Rapat Reviu SOP
Kepaniteraan, Daftar Hadir Rapat, Notulen, Foto
Rapat, SOP Penerimaan Perkara (reviu),
screenshot Inovasi Pelayanan pada masa
pandemi, SOP SILPA

d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar
d. pelayanan dan SOP

B 0,5

2 Budaya Pelayanan Prima (3) 3,0 2,80 93,40%

a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam
a. upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima

A

1

6.2.a.Undangan Rapat Koordinasi 5R dan 3S,
Daftar Hadir, Notulen Rapat 5R dan 3S,
Undangan Rapat Sosialisasi Pelaksanaan
Administrasi Perkara dan Persidangan secara
Elektronik, Daftar Hadir dan Foto, SK Nomor
W15-A11/080/OT.01.3/1/2020 Tanggal 2 Januari
2020 Tentang Penetapan Pola Pikir Budaya Kerja,
Etika dan AturanPerilaku Hakim dan Pegawai
Pengadilan Agama Negara Tahun 2020,
Undangan Rapat Sosialisai SIwas, Daftar Hadir
Rapat, Notulen, Sreenshoot Aplikasi Siwas,
Sreenshoot Aplikasi Informasi Pengawasan,
Undangan Rapat Monev SIPP, Penanganan
Pengaduan, WBS dan Benturan Kepentingan,
Daftar Hadir, Notulen, Undangan Rapat
Monitoring Pengendalian Gratifikasi Pengadilan
Agama Negara, Daftar Hadir dan Notulen, Foto
Stiker benturan kepentingan(tidak menerima
tamu yang berhubungan dengan perkara),
banner stop pungli, foto cctv, SK Nomor W15-
A11/023.1/OT.001.1/1/2019 tanggal 2 Januari
2019 tentang Pembentukan Tim Pengendali
Gratifikasi Pengadilan Agama Negara, foto tanda
terima LHKPN

b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses
b. melalui berbagai media

A

1

6.2.b. SK Nomor W15-A11/ 502/HM.02.3/4/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Teknologi Informasi (TI) , screenshot Media Sosial (Youtube, facebook, Instagram), screenshot (web, tatacara pelaksanaan Informasi), SK Nomor W15-A11/143/Hk..05/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Tim Publikasi Putusan, Perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Negara dengan BRI Cab. Kandangan, Perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Negara dengan PT. Pos Kandangan

c. Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai
c. standar

A

1

6.2.c.Undangan Rapat Pemilihan agen perubahan, SK Nomor W15-A11/019/Hk.00/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Role Model Pimpinan Dalam Pengembangan Perilaku dalam Budaya Kerja di Pengadilan Agama Negara, Foto Agen Perubahan, SK Nomow W15-A11.015/HK.00/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Agen Perubahan, Berita Acara dan Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Agen Perubahan, Foto Role Model, Undangan Rapat Penyusunan Kriteria Role Model, Notulen Rapat, Foto Penyerahan piagam role model, SK Nomor W15-A11/ 076/Kp.02.01/1/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang penunjukan tim Penilai Role Model Tahun 2020

d. Telah terdapat sarana layanan
d. terpadu/terintegrasi

A 1

b.2.d.SK Dirjen Bahwas Nomor
1403.b/DJA/S/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus
2018 tentang Pedoman Pelayanan PTSP di
Lingkungan Peradilan Agama, Foto PTSP PA
Negara, SK Nomow W15-A11/150/Hk.05/I/2020
tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukkan Tim
PTSP

6.2.e. SK Nomor W15-A11/028/KP.07.01/1/2020,
tanggal 2 Januari 2020, tentang PENETAPAN
DAFTAR PRODUK INOVASI APLIKASI DAN
PROGRAM UNGGULAN PENGADILAN AGAMA
NEGARA, Foto Brosur-brosur Prosedur (prosedur
berperkara, syarat mengajukan perkara dll),
brosur e-court, brosur tata cara perkara secara
online, brosur PTSP, brosur tentang mediasi,
brosur sms notifikasi, Perjanjian kerjasama
Pengadilan Agama Negara dengan BRI Cab.
Kandangan, Perjanjian kerjasama Pengadilan
Agama Negara dengan PT. Pos Kandangan,
Banner Inovasi(sms pengaduan, stiker tidak
menerima tamu urusan perkara, aplikasi e-
register, e-keuanga, -e-remun, arsip perkara
digital, one day minute one day publish, A-ziap,
SPPD, E-ATK, APRI), SK Tentang Inovasi
Pelayanan melalui Mobil Keliling (Mobile Court),
Foto Pelayanan Mobil Keliling, Absen Rapat
Monev Pelayanan Keliling, Notulen, Foto Rapat,
Buku Daftar Pengunjung, SK tentang Sistem
layanan Antar Produk Pengadilan (SILPA), Foto
Layanan Antar Produk Pengadilan

e. e. Terdapat inovasi pelayanan

B 0,67

3 Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan (4)

4,0

4,00 100,00%

a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	A	1		
b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	A	1		
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	A	1		
				3.a.Laporan SKM 2019, screenshot kuesioner SKM, rekap SKM semester I 2020 dan kuesioner 6.3.b.Informasi Survey Pada Website, Dokumen Survey Kepuasan Pelayanan 6.3.c.Notulen Rapat Tindak Lanjut survey, Rencana Tindak Lanjut Perbaikan hasil Survey, Daftar Hadir Rapat, Foto Rapat Tindak Lanjut Survey
TOTAL PENGUNGKIT		60,00	58,62	97,70%
B. HASIL (40)		40,0	38	95,00%
1 PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)		20	20	100,00%
a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)	15,0	4	15,00	%
Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)	5,0	100	5,00	%
2 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK(20)		20	18	90,00%
Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)				
a. (20)	20,0	3,60	18,00	90,00 %
				Laporan SKM
TOTAL HASIL		40,00	38	95,00%
Nilai Pembangunan ZI		100	96,62	96,62%